

STRATEGI POLITIK PASANGAN TATONG BARA-NAYODO KURNIAWAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018

Fikran Wardiman Paputungan

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

*Corresponding Author: fikranpaputungan69@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan strategi yang dimainkan oleh pasangan Tatong Bara dan Nayodo pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus mengidentifikasi strategi pasangan ini dalam memenangkan Pilwako Kota Kotamobagu pada tahun 2018. Temuan penelitian menggambarkan terdapat beberapa strategi yang dimainkan oleh pasangan calon ini saat bertarung pada pilwako tersebut. Ada yang berbentuk strategi defensif dan ada yang berbentuk strategi ofensif. Adapun strategi yang dimainkan diantaranya adalah dengan mempertahankan dan merawat wilayah-wilayah yang menjadi basis pendukung pasangan ini agar tidak bisa direbut pasangan calon lain, membentuk tim pemenangan yang profesional, solid, berintegritas, dan meminimalisir potensi untuk menjadi lawan dengan cara memborong semua dukungan partai politik. Strategi lainnya yang membuat pasangan ini berhasil adalah memanfaatkan keunggulan sebagai calon patahana dengan memanfaatkan dukungan birokrasi yang kuat.

Kata Kunci: Strategi Politik: Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota: Kota Kotamobagu

ABSTRACT

This article describes the strategy played by the couple Tatong Bara and Nayodo in the election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of Kotamobagu City in 2018. This study uses a qualitative method, which focuses on identifying the strategy of this pair in winning the Pilwako Kotamobagu City in 2018. The research findings describe there are several strategies played by this pair of candidates when fighting in the pilwako. Some are in the form of a defensive strategy and some are in the form of an offensive strategy. The strategies played include maintaining and caring for the areas that are the basis for supporting this pair so they cannot be taken over by other candidate pairs, forming a professional, solid, integrity winning team, and minimizing the potential to become opponents by buying up all political party support. . Another strategy that has made this pair successful is to take advantage of their superiority as a candidate for fracture by taking advantage of strong bureaucratic support.

Keywords: Political Strategy: Election of Mayor and Deputy Mayor: Kotamobagu

PENDAHULUAN

Pilkada merupakan suatu proses rekrutmen politik, yaitu kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik itu sebagai Gubernur, Bupati atau Walikota dan Wakilnya akan diseleksi dan ditentukan oleh rakyat langsung pada saat pemungutan suara berlangsung. Pilkada pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat serta merupakan pendelegasian hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, karena aktor dalam pilkada langsung adalah calon kepala daerah, partai politik dan rakyat sebagai aktor utama yang akan menentukan siapa yang akan menjabat selama periode tertentu.

Mekanisme Pilkada secara langsung dapat diyakini sebagai solusi kearah penguatan demokrasi di tingkat lokal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkuasa yang hilang pada masa orde baru. Dengan adanya perubahan pola pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik membawa pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah termasuk juga kewenangan politik di tingkat lokal.

Dalam sebuah kontestasi politik, kedudukan strategi politik sangatlah penting bagi para calon untuk mendapat kemenangan. Strategi politik merupakan segala rencana dan tindakan untuk memperoleh kemenangan dan meraih kursi dalam pemilu. Strategi politik saat ini digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu dalam berbagai pesta demokrasi baik ditingkat pusat maupun daerah, mulai dari pemilu legislatif, pemilihan Presiden, kepala daerah bahkan yang terkecil adalah pemilihan kepala desa. Tujuan akhir dari strategi politik adalah membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih yang dimaksudkan mendukung kandidat tertentu.

Pada tahun 2018 Kota Kotamobagu melakukan Pilwako. Yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Tatong Bara selaku petahana berpasangan dengan Nayodo Kurniawan (Ketua KPU Kota Kotamobagu periode 2013-2018). Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan berhadapan juga dengan Calon Petahana Wakil Walikota dari Tatong Bara, yaitu Jainuddin Damopolii yang berpasangan dengan Suharjo Makalalag. Kontestasi tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan.

Kemenangan pasangan Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan dalam pemilihan Walikota Kotamobagu tidak terlepas dari strategi politik yang dijalankan oleh pasangan calon bernomor urut 1 ini. Selain karena berstatus sebagai Wali Kota Petahana paslon ini juga di usung oleh sembilan partai besar yaitu; PAN, Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, Hanura, Gerindra, PKB, Nasdem. Berbeda dengan paslon nomor urut 2 Jainuddin Damopolii dan Suharjo Makalalag yang memilih jalur perseorangan atau non partai. Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan apakah peran partai politik sangat berpengaruh dalam konteks pemilukada di Kota Kotamobagu tahun 2018 atau faktor kapasitas figur seperti ketokohan, popularitas, dan moralitas justru yang lebih dipertimbangkan pada suatu ranah kontestasi politik, dalam hal ini pemilukada. Atau karena faktor keunggulan strategi yang dimainkan?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi Politik

Menurut Surbakti (1992) politik adalah interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat dalam kebaikan bersama dari suatu masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sehingga menurutnya kemudian strategi politik adalah ilmu tentang Teknik, taktik, cara, kiat yang digunakan oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, serta untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pada bagian yang lain, Schroder (2004) menjelaskan bahwa Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Hal ini dicontohkan dengan adanya pemberlakuan peraturan baru, pembentukan struktur baru dalam kabinet pemerintahan, atau keputusan untuk melakukan deregulasi, privatisasi, dan atau desentralisasi kewenangan. Schrooder juga menjelaskan bahwa tanpa strategi politik maka perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar tidak akan dapat diwujudkan. seringkali digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan politik, terutama pada saat pemilihan umum. Strategi politik yang dilakukan berkaitan dengan strategi kampanye dimana memiliki tujuan untuk memperoleh hasil suara yang maksimal di pemilu agar memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin guna mendorong kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat.

Menurut Micahel Alison dan Jude Kaye (dalam Anggoro dan Mulyatin, 2019) Strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya untuk mencapai tujuan dalam memenangkan kontes dibidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.

Sementara itu Surbakti (1992:448) menjelaskan bahwa strategi adalah suatu alat dan cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Strategi politik kemudian diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, dan kekuasaan.

B. Jenis Strategi Politik

Penggunaan strategi politik, ada beberapa macam strategi menurut para ahli diantaranya ialah :

1. Strategi Ofensif

Strategi ofensif merupakan strategi yang digunakan dalam strategi politik bertujuan untuk mencari pemilih baru dan memperluas pangsa pasar dalam pemilihan umum. Strategi ofensif digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah pemilihnya, strategi yang digunakan yaitu dengan memberikan inovasi program baru yang akan memberikan keuntungan terhadap pemilih (Schröder:2004). Strategi ofensif terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya ialah :

a. Strategi perluasan pasar

Strategi perluasan pasar digunakan dalam kampanye pemilu dan penerapan kebijakan. Dalam perluasan pasar perlu dilakukan pembaruan produk, produk yang lama belum berhasil dijalankan dengan baik, maka itulah yang harus dilakukan pembaruan agar menghasilkan produk baru yang lebih baik, produk baru yang dimaksud disini adalah kebijakan baru yang dihasilkan.

Bagi partai sendiri, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi dan konsekuensinya harus dipertimbangkan:

- 1) Platform partai harus memiliki ciri khas sendiri
- 2) Menciptakan profil baru yang dapat diterima oleh masyarakat
- 3) Kader partai harus menampilkan keselarasan dengan program yang dicetuskan dalam melaksanakan strategi politik,

Perluasan pasar sangatlah penting dilakukan. Dalam strategi perluasan pasar hal yang terpenting ialah bagaimana target yang dituju mampu mengerti dengan produk yang ditawarkan dan mengetahui keuntungan-keuntungannya. Maka dari itu dalam menjalankan strategi perluasan pasar, partai politik harus paham mengenai keadaan pasar itu seperti apa.

b. Strategi menembus pasar

Strategi menembus pasar merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap keadaan pemilih di daerah tersebut. Setelah mengetahui keadaan pemilih, maka dilihat juga program diberikan lawan yang sebelumnya telah berhasil dalam melakukan strategi tersebut.

2. Strategi Defensif

Strategi defensif dilakukan apabila partai politik ingin mempertahankan mayoritasnya atau pemilih yang ingin dipertahankan (Schröder:2004). Strategi defensif yang dimaksud adalah:

a. Strategi mempertahankan pasar

Strategi ini merupakan cara partai politik dalam menjaga mayoritas pemilihnya. Partai politik mempertahankan pendukung dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pemilih musiman, agar tetap menjadi pemilih tetap pada partai politik tersebut. Partai politik dalam menjaga pemilihnya, dengan cara membuat produk berbeda dari lawannya.

b. Strategi melepas atau menyerahkan pasar

Strategi dalam melepas pasar diartikan sebagai tindakan dari partai politik yang ingin menyerah dengan keadaan. Dalam arti lain partai politik mengalami keadaan ingin berkoalisi dengan partai lain, selain itu pada pemilu yang melakukan pemungutan suara putaran kedua, biasanya hal ini diikuti oleh kandidat-kandidat yang kuat dalam pemilu putaran pertama, penyerahan pasar untuk sementara diberikan kepada pihak ketiga sering terjadi.

Menurut Peter Schrooder (2004) terdapat 6 (enam) langkah strategis dalam perencanaan dan perumusan strategi, yaitu :

1. Merumuskan Misi :

Perumusan misi adalah proses penjabaran tentang berbagai hal yang harus direncanakan secara strategis. Dalam strategi politik maka Misi dapat diartikan sebagai persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu yang kemudian dipilih sebagai alternatif. Dalam perencanaan karir politik maka Misi harus diarahkan kepada strategi itu akan diarahkan. Dengan demikian maka Misi akan dapat menjadi alat untuk menetapkan kerangka dan Batasan dari sebuah tujuan atau target politik. Misi haruslah dibuat terukur baik itu dari segi jangka waktu pencapaian, tingkat capaian yang diinginkan serta harus pula realistis.

2. Penilaian Situasional dan Evaluasi.

Analisis situasional dan evaluasi intinya adalah pemetaan kekuatan internal dan eksternal. Melalui penilaian situasional dan evaluasi maka akan dapat ditentukan Langkah-langkah strategi politik yang harus dilakukan. kegiatan analisis situasional dan evaluasi terdiri dari :

- 1) Pengumpulan fakta dan data lapangan terkait dengan kekuatan internal dan kualitas organisasi situasi kontemporer, karakteristik masyarakat, dan situasi politik kontemporer.
- 2) Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan.
- 3) Seluruh fakta dan data yang telah terkumpul selanjutnya secara sistematis di cluster dan diukur berdasarkan relevansi kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Tiap data dan fakta dinilai apakah bernilai sebagai pendukung atau sebagai kelemahan yang harus dibenahi.
- 4) Analisis Kekuatan dan Kelemahan :
Melalui analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada, maka kemudian ditentukan Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan memperkuat kekuatan dan mereduksi kelemahan.
- 5) Penentuan Umpan balik (*feed-back*) :
Langkah selanjutnya adalah menguji potensi/peleluang capaian dari strategi yang telah disusun. Apabila hasil simulasi atau pengujian ini menunjukkan peluang yang positif, maka dengan demikian strategi yang telah ditentukan akan menghasilkan kemenangan politik. Namun demikian jika sebaliknya, maka perencanaan strategi politik tersebut haruslah diubah.

3. Perumusan Sub-Strategi.

Perumusan sub strategi adalah Langkah-langkah yang sudah bersifat teknis operasional. Kegiatan pada tahap ini adalah menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi.

- a. Menyusun tugas-tugas :
Tugas-tugas disusun berdasarkan hasil analisa aspek kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT Analysis).
- b. Merumuskan strategi :
Strategi dirumuskan dengan cara berdasarkan isu-isu yang terkait dengan lawan politik, strategi bergantung pada seberapa besar kekuatan dan kelemahan kita. Semakin kuat posisi politik, maka akan semakin ringan strategi yang harus dijalankan. Sebaliknya semakin besar poin kelemahan, maka semakin berat strategi politik yang harus dijalankan.
- c. Mengevaluasi Strategi :
Dalam pelaksanaannya setiap strategi yang dijalankan haruslah dievaluasi secara periodik. Tujuannya adalah untuk mengontrol apakah tingkat capaian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika dalam prosesnya terjadi hal-hal yang tidak atau belum sesuai harapan, maka strategi yang digunakan haruslah diubah atau dikembangkan.

4. Menetapkan Tingkat Capaian.

Segenap strategi yang dijalankan pada dasarnya adalah mengarah pada target tingkat capaian. Maksudnya adalah dalam kontestasi politik seperti Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota, maka harus ada target tingkat capaian suara yang harus diperoleh. Hal ini tentunya berdasarkan pada perhitungan jumlah pemilih yang secara sah diputuskan oleh

penyelenggara. Ini merupakan hal yang amat penting, karena jumlah suara yang diperoleh dalam kontestasi politik pada dasarnya adalah tujuan utama yang ingin diperoleh dalam sebuah pertarungan politik. Yaitu bahwa suara terbanyak adalah pemenang dari sebuah kontestasi politik.

5. Target Pencitraan.

Pencitraan adalah bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam sebuah kontestasi politik. Pandangan dan penilaian dari publik atas karakter, sifat dan gaya seseorang calon adalah salah satu faktor yang mendorong pemilih untuk memberikan suaranya. Diluar dari trackrecord dan kinerja dari seorang politisi, maka strategi pencitraan yang hebat (yang nampak alami), akan memberikan dampak positif terhadap seseorang dalam kontestasi politik. Para calon presiden Amerika Serikat contohnya, acapkali meng“hire” (menyewa) kalangan profesional yang ahli dalam *publicspeaking*, ahli dalam kepribadian, dan ahli dalam merancang pakaian untuk melatih mereka tampil secara optimal dihadapan publik. Selain itu adalah untuk menghasilkan kesan baik di mata masyarakat pemilih.

6. Penentuan Kelompok Sasaran.

Terdapat dua kelompok sasaran dalam kontestasi politik, yaitu kelompok yang teridentifikasi sebagai pendukung baik itu militant maupun moderat. Serta kelompok yang teridentifikasi sebagai pendukung lawan politik. Berdasarkan pada hasilpemetaan maka strategi untuk dua kelompok ini akan menjadi berbeda. Target kepada kelompok pendukung adalah mempertahankan dan memperkuat dukungan dari mereka. Sementara strategi terhadap pendukung lawan adalah melemahkandukungan dan menarik dukungan dari mereka.

D. Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah

Strategi pemenangan dilakukan dalam upaya meningkatkan jumlah massa pemilihnya. Dalam hal ini harus ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan dan pemikiran yang positif terhadap kandidat dan partai pengusungnya, sehingga nantinya kampanye pemenangan dapat dilaksanakan oleh partai dan kandidat dapat berjalan baik dan berhasil. Strategi pemenangan yang dilakukan oleh setiap kandidat merupakan bentuk strategi politik. Realita yang terjadi di masyarakat, sebuah kemenangan yang dinyatakan berpihak kepada rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan, karena pemimpin yang telah berjanji agar mendapatkan keyakinan masyarakat namun setelah terpilih pemimpin menjadi lupa dengan hal-hal yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Strategi yang dilakukan kandidat dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para calon untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang dari lawan. Strategi menghasilkan gagasan dan konsep yang dikembangkan oleh para praktisi.

Setiap kandidat dalam pemilihan kepala daerah memiliki strategi yang ditempuh untuk memenangkan perebutan kekuasaan secara legal di daerah. Masing-masing kandidat memiliki taktik dan strategi untuk mencapai kepentingan kekuasaan. Seperti yang dikatakan Bambang Purwoko bahwa pada kenyataannya pilkada belum menjadi jaminan bagi lahirnya proses demokrasi meskipun telah memiliki regulasi yang teratur. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang sangat jelas dari keadaan kekuasaan mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai (Halim, 2014 :37). Pemilihan strategi yang tepat sangat penting agar proses pemenangan bisa efektif dan efisien (secara politik dan ekonomi). Pemilihan strategi tentu ditujukan untuk tiga hal yaitu untuk mengetahui peluang presentase kemenangan sebelum penyelenggaraan pilkada dilaksanakan, untuk mengetahui lawan politik yang kuat, dan untuk mengetahui resource financial yang perlu dipersiapkan. Ketiga tujuan tersebut menjadi informasi awal menuju pemenangan pilkada (Ispandiarno:2014). Hal ini memerlukan pelaksanaan secara hati-hati, sebab jika penetapan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, material, dan tenaga. Oleh karena itu, hal ini merupakan rahasia yang disembunyikan oleh para ahli perencanaan kampanye.

Tujuan akhir dalam kampanye pemilihan kepala daerah adalah untuk membawa calon kepala daerah yang didukung oleh tim kampanye politiknya menduduki jabatan Kepala Daerah yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Agar tujuan

akhir tersebut dapat dicapai, diperlukan strategi yang disebut strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik. Terdapat tiga jenis strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik menurut Anwar Arifin (2003:102), yaitu (1) Ketokohan dan kelembagaan, dengan cara memantapkan ketokohan dan merawat kelembagaan, (2) Menciptakan kebersamaan dengan memahami masyarakat, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, serta memilih dan memilih media, dan (3) Membangun konsensus, melalui kemampuan berkompromi dan kesediaan untuk membuka diri.

Menurut Adman Nursal (2004), keberhasilan dalam sebuah strategi politik erat kaitannya dengan pemasaran politik, dalam sebuah pemasaran politik selalu diawali dengan kegiatan pembentukan tim kerja yang biasa disebut Tim Sukses. Tim sukses direkrut dari orang-orang yang memiliki potensi dan kompetensi berdasarkan tugas dan fungsinya. Pemilihan tim sukses yang penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan atau kemenangan dalam pemilihan kepala daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Moleong, 2007:6; Nawawi, 2007 : 67), dengan fokus penelitian untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi yang dimainkan oleh pasangan calon Tatong Bara dan Nayodo pada pertarungan Pilwako Kota Kotamobagu tahun 2018. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2018

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu 2018 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Tatong Bara selaku petahana berpasangan dengan Nayodo Kurniawan (Ketua KPU Kota Kotamobagu periode 2013-2018). Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan berhadapan juga dengan Calon Petahana Wakil Walikota dari Tatong Bara, yaitu Jainuddin Damopolii yang berpasangan dengan Suharjo Makalalag.

Pada periode pertarungan ini, Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan maju dengan dukungan dari 9 (sembilan) Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), partai Golongan Karya (Golkar), PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKS, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), partai Gerindra, Partai Kesatuan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). 9 partai ini representasi dari perolehan kursi di DPRD kota Kotamobagu periode 2014-2019. Jumlah kursi di DPRD kota Kotamobagu adalah 25 kursi dengan komposisi PKB (3 kursi), Gerindra (1 kursi), PDI – Perjuangan (5 kursi). Golkar (3 kursi), partai Nasdem (4 kursi), PKS (1 kursi), PPP (1 kursi), PAN (1 kursi), HANURA (3 kursi), Partai Demokrat (1 kursi) (DPRD, kota Kotamobagu, 2021). Sementara pasangan Jainudin Damopolii dan Suharjo Makalalag maju sebagai calon pasangan independent. Pasangan ini memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon independent oleh karena bukti administrasi dukungan yang diperoleh melebihi jumlah 10% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemilu. Jumlah DPT pada Pemilihan Walikota kota Kotamobagu pada tahun 2018 lalu adalah 89.415 pemilih dan pasangan ini memperoleh bukti dukungan sebanyak 9.875 bukti dukungan (sumber: KPU kota Kotamobagu, 2019).

Secara resmi pertarungan antara dua Pasangan Calon ini sebenarnya dimulai pada saat KPU Kota Kotamobagu memulai tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kotamobagu Tahun 2018, yaitu tahap Pendaftaran bakal Pasangan Calon. Hasil wawancara dengan kedua Tim Sukses dari kedua kubu diperoleh data bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan mendaftar lebih dahulu ke KPU Kota Kotamobagu, yaitu sesuai dengan jadwal pendaftaran yang ditetapkan secara nasional oleh KPU RI yaitu tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018. Pasangan Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan datang mendaftar ke KPU Kota Kotamobagu tepat pada hari pertama jadwal

pendaftaran. Pendaftaran yang dilakukan pasangan TBNK (Tatong Bara – Nayodo Kurniawan) sedikit terkendala dengan ketidakhadiran Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kotamobagu.

Mulanya dua partai yang terlambat memasukkan berkas dukungan pencalonan, yakni Partai Golkar, kemudian terakhir PAN. Partai Golkar tuntas karena Ketua DPD II Golkar Kota Kotamobagu datang terlambat. KPU RI sudah menetapkan bahwa bagi partai politik yang tidak bisa menghadirkan pengurusnya dalam pencalonan tersebut, maka menghadirkan surat keputusan dari DPP partai yang bersangkutan dan langsung ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal.

Pada saat pendaftaran pasangan calon TBNK, Ketua dan Sekretaris PAN Kota Kotamobagu tidak hadir untuk mendandatangani dokumen pendaftaran, maka ini harus digantikan Surat Keterangan dari Ketua Umum dan Sekjen PAN. Dalam surat KPU RI tertanggal 5 Januari 2018 sebagai penjelasan dari PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan. dijelaskan bahwa pengambilalihan partai dengan menerbitkan keputusan pengambilalihan proses pencalonan tersebut. Surat Keterangan pengambilalihan DPP PAN terhadap proses pencalonan bakal paslon Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan (TBNK) keluar pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wita. Diurutan dan surat edaran KPU RI ditegaskan bahwa seluruh berkas pencalonan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, tegas Nova Tamon, Ketua KPU Kota Kotamobagu, usai menyerahkan tanda terima diterimanya berkas pencalonan TBNK (rangkuman hasilwawancara dengan salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Kotamobagu periode 2018-2023), mantan Ketua Tim Sukses Pasangan TBNK (Tatong Bara-Nayodo Kurniawan), mantan Ketua Tim Sukses Pasangan Jainudin Damopolii – Suharjo Makalalag, serta penelusuran atas dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotmobagu Tahun 2018 dari KPU kota Kotamobagu).

Pasangan Calon Jainudin Damopolii dan Suharjo Makalalag datang mendaftar ke KPU di batas hari terakhir pendaftaran yaitu pada tanggal 10 Januari 2018. Dengan demikian sudah resmi ada dua peserta Pilkada Kota Kotamobagu Tahun 2018 ini. Meski demikian KPU Kotamobagu pada waktu itu tetap menunggu hasil akhir dukungan pasangan perseorangan. Karena mereka masih harus memperbaikinya dan diberikan kesempatan hingga tanggal 18-20 Januari 2018. Dalam wawancara yang dilakukan, Ketua KPU Kotamobagu periode itu beserta empat Komisioner lainnya menjelaskan secara keseluruhan proses pemasukan berkas pasangan Jainudin-Suharjo berjalan lancar, meski ada beberapa dokumen yang tertinggal dan harus dilengkapi. Pada waktu itu kami sempat menskorsing acara sekitar 75 menit, tapi kemudian tepat pukul 12.30 wita dokumen Jainudin-Suharjo dinyatakan lengkap. Setelah itu kami lakukan penyerahan surat tanda terima dari KPU Kota Kotamobagu ke mereka pasangan calon (hasil wawancara lapangan, Mei 2022).

Sebelumnya memang sesuai dengan Aturan KPU RI, sebelum mendaftar, setiap bakal paslon Walikota dan Wakil walikota Kota Kotamobagu harus memenuhi syarat dukungan dan sebaran minimal sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Begitu juga bakal paslon yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik, semua persyaratan harus dipenuhi. Bila persyaratan belum terpenuhi, KPU Kota Kotamobagu memberi kesempatan memperbaiki. Namun ketika sudah diperbaiki dan hasil penelitian masih ada persyaratan tidak terpenuhi maka berdasarkan ketentuan, bakal paslon dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Sementara untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Independen) KPU melakukan *treatment* yang lebih detail. Khusus verifikasi paslon perseorangan, sesuai alur KPU Kota Kotamobagu harus memastikan pada saat penyerahan dokumen dukungan terkait dukungan minimal dan sebaran minimal terpenuhi dulu. Jika itu terpenuhi, maka akan dikeluarkan tanda terima. Jika, belum terpenuhi KPU Kota Kotamobagu akan mengembalikan untuk diperbaiki, dan dokumen bisa dimasukkan lagi hingga batas akhir tahapan penyampaian dokumen dukungan. Jika dokumen perbaikan sudah diterima maka dilakukan verifikasi administrasi. Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual di tingkat bawah oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Tatong Bara – Nayodo Kurniawan serta Jainudin Damopolii – Suharjo Makalalag resmi ditetapkan oleh KPU Kota Kotamobagu melalui pleno KPU sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Periode 2018 – 2023 pada tanggal 12 Januari 2018. Nuansa pertarungan sudah terasa pada saat itu oleh karena berdasarkan data yang diperoleh dari

informan KPU dijelaskan bahwa Kubu Tatong Bara – Nayodo Kurniawan sempat melakukan interupsi pada saat pembacaan Keputusan. Mereka keberatan dan mengajukan pertanyaan soal “mengapa tahapan penetapan paslon tersebut tidak menunggu hasil keputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang sementara menyidangkan kasus pemalsuan tandatangan dukungan paslon perseorangan”. Hal ini kemudian dijawab oleh Ketua KPU Kota Kotamobagu bahwa mereka tidak dapat menunggu, karena sebagaimana jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI secara nasional, jadwal penetapan calon hanya hari ini. Sehingga mereka (KPU Kotamobagu) tetap berketetapan untuk melaksanakan pleno penetapan calon pada hari itu (hasil wawancara dengan Ketua KPU Kotamobagu periode 2013-2018).

Tiga hari setelah pleno penetapan para Calon Walikota dan Wakil Walikota kota Kotamobagu, tanggal 13 Januari 2018 selanjutnya, KPU Kota Kotamobagu, melakukan tahap pencabutan nomor urut pasangan calon yang akan kegiatan ini dilakukan di Gedung DPRD Kota Kotamobagu, pukul 14.00 wita. Hadir pada Pleno Terbuka tersebut Nayodo Koerniawan, Tatong Bara diinformasikan berhalangan hadir. Kemudian Jainudin Damopolii, Suharjo Makalalag, Kapolres Bolmong, Komandan KODIM 1303 Bolmong dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu. Selain itu dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Mustarin Humagi dan perwakilan KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Pasangan Tatong Bara-NayodoKorniawan yang diusung Sembilan partai politik pemilik 25 kursi DPRD Kota Kotamobagu, mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan calon Jainudin Damopolii-Suharjo Makalalag yang maju melalui jalur perseorangan atau independen beroleh nomor urut 2. Pengundian ini dilakukan secara terbuka dan disaksikan banyak orang, dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh masyarakat maupun tokoh adat. Acara pencabutan nomor Urut Pasangan Calon ini diawasi langsung Panwas Kota Kotamobagu. Proses pengundian diawali dengan pengambilan oleh amplop pasangan calon yang mendaftar pertama kali yakni pasangan Tatong Bara-Nayodo Koerniawan dengan jargon Torang TBNK. Maka dengan demikian pasangan TBNK mendapatkan amplop A, dan pasangan Jainudin Damopolii-Suharjo Makalalag JADI JO mendapatkan amplop B.

Setelah masing-masing mendapatkan amplop undian A dan B, kedua pasangan calon bergantian mengambil nomor urut resmi pasangan calon peserta Pilwako Kota Kotamobagu Tahun 2018 berbingkai dan dibungkus mirip kado dan terletak di atas meja. Setelah itu kedua pasangan calon berdiri berjajar di depan menghadap ke arah para undangan. Setelah amplop dibuka ternyata Hasilnya adalah, Torang TBNK mendapatkan nomor urut 1 dan JADI JO mendapatkan nomor urut 2.

Pada tahapan selanjutnya, dua pasangan calon ini akan berhadapan dengan masyarakat calon pemilih, karena memasuki masa kampanye yang dimulai pada tanggal 15 februari sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Mengantisipasi terjadinya konflik horisontal dan gesekan antar kubu pasangan calon, maka tanggal 18 februari 2018. KPU Kota Kotamobagu menggelar Deklarasi Kampanye Damai. Salah satu sub tahapan yang menarik dari tahapan kampanye adalah acara Debat Publik. Pada kegiatan Debat Publik ini kedua Pasangan Calon akan diuji kemampuannya baik secara akademik maupun dalam teknis pengambilan keputusan atau hal yang terkait dengan kebijakan publik. Tatong Bara – Nayodo Kurniawan dan Jainudin Damopolii – Suharjo Makalalag harus memperlihatkan kemampuan dan kecerdasan mereka di depan para pendukungnya masing-masing dan juga di depan khalayak atau masyarakat kota Kotamobagu. Adapun kegiatan Debat Publik ini berlangsung dua kali yaitu yang pertama adalah pada tanggal 16 April 2018. Kegiatan Debat Publik ini mendapatkan respons yang positif dan antusiasme masyarakat kota Kotamobagu.

KPU Kota Kotamobagu mengumumkan dan menetapkan total jumlah suara pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2018 sebanyak 69.465, dengan jumlah suara sah sebanyak 68.968, serta suara tidak sah sebanyak 497.

Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di empat kecamatan tanpa adanya perubahan penghitungan versi C1, memperlihatkan Pasangan Tatong Bara – Nayodo Kurniawan unggul di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, dan Kecamatan Kotamobagu Utara. Pada tabel dapat dilihat bahwa pada kecamatan Kotamobagu Barat pasangan Tatong Bara-Nayodo Koerniawan memperoleh 10.502 suara dan Jainuddin Damopolii-Suharjo Makalalag 11.403 suara. Sementara di kecamatan Kotamobagu Selatan pasangan Tatong Bara-Nayodo Koerniawan memperoleh 12.107 dan pasangan Jainuddin

Damopolii sebanyak 6.904 suara. Di kecamatan Kotamobagu Timur Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan meraup 10.722 suara, sementara pasangan Jainuddin Damopolii-Suharjo Makalalag sebanyak 7.231 suara. Pada kecamatan yang terakhir yaitu di kecamatan Kotamobagu pasangan Tatong Bara-Nayodo Koerniawan memperoleh 6.077 suara, sementara pasangan Jainuddin Damopolii-Suharjo Makalalag memperoleh 6.022 suara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU kota Kotamobagu pada periode itu, dijelaskan bahwa penetapan ini dilakukan setelah berkonsultasi secara berjenjang serta menunggu surat Rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait akhir tahapan Pilkada 2018, KPU Kota Kotamobagu akhirnya menetapkan Paslon Terpilih Pilkada Kota Kotamobagu Tahun 2018 pada Kamis (26/04/18). Ditambahkan pula bahwa aturan yang berlaku pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2018 adalah berbeda dengan aturan sebelum-sebelumnya. Kalau dulu begitu Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara langsung dilanjutkan dengan penetapan Pasangan Calon terpilih, tapi sekarang tidak, jelas Nova Tamon, Ketua KPU Kota Kotamobagu sebelum membacakan Berita Acara (BA) Penetapan Paslon Terpilih. ketentuan yang berlaku pada waktu itu dan juga sekarang semua pihak tetap harus menunggu rekomendasi dari MK, meski pada kenyataannya memang tidak ada gugatan. Karena itu kami harus klarifikasi kembali informasi bahwa KPU Kota Kotamobagu sengaja mengundurkan waktu penetapan, itu sama sekali tidak benar. Sesuai tahapan dan jadwal, waktu penetapan paslon terpilih tiga hari, yaitu dari tanggal 24, 25 dan 26 Juli 2018, dan itu merupakan waktu terakhir”

Kemenangan Pasangan Calon Tatong Bara – Nayodo Koerniawan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Penetapan yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU Kota Kotamobagu pada waktu itu Nova Tamon. Menurut dia, penetapan ini ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 107/PL.03.7-Kpt/7174/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu tahun 2018, Paslon Nomor Urut 1 atas nama Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan (TBNK), ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan perolehan suara sebanyak 37.408 (54,24 persen) dari total suara sah.

B. Strategi Politik Pasangan Tatong Bara–Nayodo Kurniawan.

Hasil penelitian menunjukkan strategi politik yang dipergunakan pasangan Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan dalam upaya untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Kotamobagu Tahun 2018 diantaranya :

1. Strategi ofensif

• Strategi Menembus Pasar

Langkah awal yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan ini adalah melakukan pemetaan statistik atas kekuatan internal dan kekuatan eksternal (kekuatan lawan). Tim melakukan pemetaan secara menyeluruh pada 4 (empat) kecamatan yang berada di kota Kotamobagu yaitu kecamatan Kotamobagu Timur yang terdiri dari 4 desa yaitu desa Kobo Kecil, desa Moyag, desa Moyag Tampoan, dan desa Moyag Todulan) dan 6 kelurahan yaitu kelurahan Kobo Besar, Kotabangon, Matali, Motoboi Besar, Sinindian, dan kelurahan Tumubui. Selanjutnya kecamatan Kotamobagu Barat yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Molinow, kelurahan Mogalaing, kelurahan Mongkonai, dan kelurahan Mongkonai Barat. Kemudian kecamatan Kotamobagu Utara yang terdiri dari 5 desa dan 3 kelurahan. Desa dan kelurahan yang dimaksud adalah desa Bilalang I, desa Bilalang II, desa Pontodon, desa Pontodon Timur, desa Sia serta kelurahan Biga, kelurahan Genggulang dan kelurahan Upai. Selanjutnya kecamatan Kotamobagu Selatan yang terdiri dari 7 desa yaitu desa Bungko, desa Kopandakan 1, desa Poyowa Besar 1, desa Poyowa Besar II, desa Poyowa Kecil dan desa Tabang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci (Ketua Tim Pemenangan TBNK) (wawancara lengkap ada di lampiran), pemetaan suara amat penting bagi mereka untuk menentukan Langkah-langkah selanjutnya. Hasil pemetaan internal dengan menggunakan tenaga profesional menurut mereka menunjukkan hasil bahwa mereka unggul di 3 kecamatan dari 4 kecamatan yang ada di kota Kotamobagu. Yaitu kecamatan Kotamobagu Ti-

mur, kecamatan Kotamobagu Selatan dan kecamatan Kotamobagu. Sementara 1 kecamatan tersisa yaitu kecamatan Kotamobagu Barat, teridentifikasi pendukung Jainudi Damopolii dan Suharjo Makalalag lebih besar di wilayah ini. Pemetaan ini tidak hanya menyangkut soalkuantitas tetapi juga memetakan soal kualitas dukungan. Hasil yang mereka peroleh adalah rata-rata pendukung di atas 80% adalah pendukung yang militan. Dari hasil pemetaan ini maka Tim menyimpulkan bahwa mereka dapat menekan cost politics untuk pertarungan Walikota dan Wakil Walikota kota Kotamobagu tahun 2018 lalu, dan akan lebih berkonsentrasi pada upaya untuk mempertahankan konstituen.

- **Memetakan Potensi Konstelasi Pertarungan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pemetaan potensi konstelasi pertarungan yang dimaksudkan adalah menghitung kemungkinan persebaran suara terkait dengan jumlah kontestan. Dengan merujuk pada karakteristik pemilih, Tim Sukses melihat bahwa semakin banyak jumlah calon maka persebaran suara juga akan semakin meluas. Hal ini dengan perhitungan akar kekeluargaan masih mendominasi pilihan masyarakat di kota Kotamobagu, dan pada urutan selanjutnya adalah faktor budi baik dan jasa. Meskipun faktanya hampir keseluruhan warga kota Kotamobagu masih memiliki hubungan kekerabatan yang amat kuat, namun demikian semakin dekat garis kekerabatan, maka akan semakin kuat pula militansi dukungan yang akan diberikan. Pada sisi yang lain masyarakat Kotamobagu akan merasa terikat pada seseorang jika terdapat seseorang atau kerabat yang banyak berbuat kebaikan bagi diri maupun keluarganya.

Atas fakta sosial ini, maka Tim Sukses pasangan Tatong Bara – Nayodo Kurniawan memutuskan, pertarungan untuk merebut posisi Walikota dan Wakil Walikota kota Kotamobagu, harus dihadapi dengan jumlah lawan politik yang sesedikit mungkin. Semakin sedikit yang maju dalam kontestasi, maka potensi perolehan suara akan semakin besar. Oleh karenanya atas dasar perhitungan ini, Pasangan ini memutuskan untuk “membeli” dukungan dari partai politik lainnya di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Kotamobagu tahun 2018 lalu. Tim Pemenangan pasangan ini kemudian melakukan lobi dan “negosiasi” dengan para pimpinan partai politik di kota Kotamobagu, melalui lobi, persuasif, negosiasi dan bahkan juga dengan melakukan pressure politik, maka hasilnya adalah Pasangan Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan mendapat dukungan dari (sembilan) Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), partai Golongan Karya (Golkar), PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKS, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), partai Gerindra, Partai Kesatuan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Awalnya Ketua Partai Golkar kota Kotamobagu menolak untuk memberikan dukungan, namun demikian melalui proses negosiasi dan komunikasi politik pada pimpinan partai Golkar di tingkat Pusat, pada akhirnya partai Golkar memberikan dukungan kepada pasangan ini (rangkuman wawancara dengan Ketua Tim Pemenangan pasangan TBNK). Adanya dukungan dari 9 partai politik ini, berarti pasangan ini mendapatkan dukungan bersih dari seluruh partai politik yang berada di kota Kotamobagu. Hasilnya adalah tidak ada pesaing dari partai politik lain, dan pasangan Jainudin Damopolii dan Suharjo Makalalag harus maju sebagai calon independen.

- **Kampanye Yang Lebih Terarah Pada Wujud Melebur Atau Menyatu Dengan Masyarakat.**

Dalam kegiatan kampanye yang diberikan sesuai dengan Peraturan KPU, pasangan TBNK lebih memilih melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat. Kampanye tidak lagi hanya berupa pidato dihadapan masyarakat, tetapi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bersama seperti panggung terbuka bagi masyarakat, makan bersama secara sederhana. Selain itu pembagian kaos dan atribut yang disesuaikan dengan selera masyarakat. Masyarakat pemilih diberikan keleluasaan untuk memilih warna, model dan desain dari kaos yang akan diberikan kepada mereka, kemudian Tim Pemenangan pasangan TBNK akan membuatnya sesuai dengan pesanan dan keinginan mereka. Model dan desain kaos ini dapat berbeda-beda antar kecamatan atau kelurahan, karena disesuaikan dengan permintaan dan keinginan dari masing-masing wilayah (hasil wawancara dengan ketua tim pemenangan TBNK 2022).

- **Memperlemah Dukungan Terhadap Lawan.**

Strategi yang dimaksud adalah Tim Pemenangan pasangan TBNK yang pertama-tama adalah mendeteksi para pendukung lawan politik mereka secara detail mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Kepada mereka ini dilakukan pendekatan persuasive dan juga represif. Bentuk persuasi adalah seluruh bantuan (dalam bentuk fisik dan bukan berupa uang) diberikan secara merata kepada masyarakat tanpa melihat apakah mereka pendukung atau lawan politik. Selanjutnya cara kedua adalah dengan melakukan represi halus kepada pendukung pasangan JadiJo, dan juga kelompok yang tidak berkeinginan untuk memilih (kelompok ini dalam kontestasi politik disebut dengan istilah Golput).

2. Strategi Defensif

- **Mobilisasi Birokrasi.**

Cara ini sebenarnya merupakan strategi “instan” yang hampir selalu digunakan oleh Calon Petahana di manapun. Birokrasi hampir selalu dijadikan “mesin politik” serta “kantong suara” yang utama oleh para calon petahana. Pengerahan ASN/PNS pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Kotamobagu tahun 2018, “pengerahan” kekuatan suara ASN/PNS tidak hanya di lingkungan pemerintah kota Kotamobagu, tetapi juga lebih luas sampai pada ASN/PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow. Ini dapat dilakukan oleh karena lebih dari 70 % ASN/PNS kabupaten Bolaang Mongondow merupakan penduduk atau berdomisili di kota Kotamobagu.

Awalnya sebelum Kotamobagu belum berstatus sebagai kota (masih kecamatan), kantor pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow adalah terletak di Kotamobagu. Sehingga lebih dari 90 % ASN/PNS kabupaten Bolaang Mongondow adalah penduduk dari Kotamobagu. Namun demikian pengerahan ASN/PNS dari pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow dapat terjadi oleh karena adanya dukungan yang kuat dari Bupati kabupaten Bolaang Mongondow periode 2017-2022. Bupati kabupaten Bolaang Mongondow pada periode ini Yasti Supredjo adalah satu partai dengan calon petahana Tatong Bara serta memiliki hubungan emosional yang amat kuat. Sehingga Tatong Bara mendapatkan dukungan politik penuh dari Yasti Supredjo (rangkuman hasil wawancara dengan Ketua Tim Pemenangan pasangan TBNK, PNS dari kabupaten Bolaang Mongondow dan kota Kotamobagu).

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan kota Kotamobagu adalah 2.741 orang pegawai ASN/PNS kota kotamobagu tersebar pada 6 (enam) Badan, 23 (dua puluh tiga) kantor Dinas, Kantor Inspektorat Daerah, kantor-kantor Kecamatan yang tersebar di seluruh kabupaten Bolaang Mongondow, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas - Puskesmas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU kabupaten Bolaang Mongondow, dan Sekretariat Bawaslu.

Diperkirakan, terdapat sekitar 3.216 orang Pegawai Negeri Sipil (jumlah ini merupakan 75% dari keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil) dari kabupaten Bolaang Mongondow yang juga memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Kotamobagu. Dengan demikian jika ditambahkan dengan ditambah dengan 3.216 orang pegawai (pembekal Bolaang Mongondow), akan ada 5.957 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) orang pegawai yang berpotensi kuat akan memberikan hak suaranya kepada pasangan Tatong Bara - Nayodo Koerniawan (Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Bolaang Mongondow dan kota Kotamobagu Tahun 2018).

Temuan penelitian menemukan adanya pola yang sistematis, masif dan terstruktur yang digunakan untuk menggerakkan dan menjadikan birokrasi sebagai alat untuk mendulang suara yang paling efektif. Ada pola yang berjenjang, dari atas kebawah, dan masing-masing unsur diberikantanggung jawab yang besar atas hal ini. Pada dasarnya seluruh data yang diperoleh dari para informan mengarah pada apa yang disampaikan di atas, yaitu mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow dan juga kota Kotamobagu sifatnya adalah terstruktur, sistematis dan masive. Pola terstruktur adalah adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang berjenjang di lingkungan birokrasi pemerintahan. Masing-masing pejabat di setiap instansi bertanggung jawab untuk menggolong dukungan dan menggerakkan para pegawai di lingkungan kerja mereka. Semakin tinggi jabatannya maka dia akan memiliki harus menjalankan tugas-tugas dan fungsi kordinatif, dan semakin kebawah,

maka tanggung jawabnya semakin operasional. Para pegawai di bagian bawah dikontrol, diawasi dan harus melaporkan perkembangan di lapangan kepada pejabat di atasnya dan begitu seterusnya berjenjang keatas. Segenap perkembangan yang terjadi di lapangan senantiasa dipantau dan dievaluasi secara konsisten. Setiap minggu di lingkungan kerja masing-masing pejabat harus dilakukan evaluasi perkembangan.

Pengerahan ASN/PNS dari pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow dan kota Kotamobagu, semuanya diawasi dan dikontrol oleh Ketua Tim Pemenangan TBNK yang berasal dari luar lingkungan birokrasi. Ketua Tim adalah juga arsitekpolitik juga merupakan konsultan politik dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Nomor urut 1 (Tatong Bara – Nayodo Koerniawan). Scenario maker memiliki “mata” dan “kaki” yang tugasnya memantau perkembangan di lingkungan birokrasi pemerintahan dan tidak diketahui oleh sebagian besar Pegawai Negeri Sipil.

Temuan penelitian mendapati adanya penggunaan model MLM (*Multi Level Marketing*) seperti dalam bisnis. Tiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk mendorong dan menggerakkan orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk memilih Pasangan Nomor urut 1. Paling tidak adalah lingkungan keluarganya sendiri seperti istri atausuami dan juga anak-anak mereka yang sudah memiliki hak pilih. Begitu selanjutnya, juga harus meluas pada lingkungan yang lebih besar seperti saudara-saudara mereka seperti kakak atau adik, orang tua, sepupu dan seterusnya.

Pola kerja ini, diawasi dan dimonitor perkembangannya. Selalu dilakukan pembahasan rutin yang mengontrol perkembangan suara secara kuantitatif. Dalam proses yang berjalan, tiap PNS harus memberikan laporan tentang perkembangan soal dukungan di lingkungannya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai alat kontrol untuk melihat fluktuasi dukungan, dan memprediksi jumlah suara yang akan diperoleh. Semakin dekat dengan hari “ H” (pemungutan suara), maka dilakukan inventarisasi per wilayah per Dinas atau per lembaga. Artinya bahwa diinventarisasi siapa membawa siapa dan mengajak siapa (rangkuman hasil wawancara dengan para informan kunci pada bulan Mei 2022).

Pada hari pemungutan suara ada sistem kontrol untuk mengawal para Pegawai Negeri Sipil. Ada empat kecamatan di kota Kotamobagu. Kotamobagu Utara, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur dan Kotamobagu Barat. Tiap pemilih pada tiap kecamatan punya ciri tertentu pada kertas suara. Ini harus dilakukan untuk menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memang benar-benar memberikan suaranya kepada Calon Petahana mereka. Pada tiap kecamatan ada kordinator wilayah. Kertas suara yang sudah dicoblos harus diphoto dan photo dikirim kepada kordinator masing-masing wilayah. Jadi sangat kecil “ruang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk tidak memberikan suara mereka kepada Petahana. Hasil pengamatan lapangan, dan juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan. Hal ini bukan berarti tidak ada Pegawai Negeri Sipil yang memilih atau menentukan pilihan politiknya pada kubu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dari hasil wawancara diperkirakan jumlahnya mencapai 5 (lima) sampai 10 % (sepuluh) persen dari keseluruhan jumlah PNS. Kenyataannya ternyata bagi kubu petahana bukanlah hal yang sulit untuk “mendeteksi” para Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendukung mereka. Dalam perjalanannya, terdapat Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan dan ada juga yang menerima sanksi *non-job*. Ini dialami oleh para Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondow yang berdomisili di kota Kotamobagu. Ada Kepala Bagian dari sebuah Dinas yang kemudian dipindahkan menjadi Kepala Sekolah Dasar di salah satu kecamatan di Kotamobagu.

- **Strategi “Blocking Area”**

Salah satu strategi defensif yang dilakukan adalah dengan melakukan *blocking area*. Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan pasar bertujuan untuk memelihara pemilih militan. Berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan informan kunci didapati Strategi yang dimaksud dilakukan dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk “masuk” ke wilayah yang dinilai merupakan wilayah konstituen pendukung pasangan TBNK. Penentuan wilayah ini sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya (lihat strategi 1) adalah berdasarkan pemetaan politik yang dilakukan pada awal sebelum penentuan bentuk kegiatan kampanye yang akan dilakukan. “Penutupan ruang” bagi lawan adalah pada wilayah-wilayah yang teridentifikasi merupakan wilayah yang memiliki karakteristik masih memungkinkan untuk dapat di-

intervensi oleh lawan. Wilayah yang dimaksud adalah di kelurahan Mongkonai dan kelurahan Mogolaing kecamatan Kotamobagu Barat. Di dua kelurahan ini, pasangan Jainudin Damopolii dan Suharjo Makalalag tidak diberikan kesempatan untuk masuk. Koordinator Pemenangan Pasangan TBNK dan anggotanya di dua kelurahan ini mengawasi secara ketat dan menutup masuknya Tim Pemenangan JadiJo (Jainudin Damopolii – Suharjo Makalalag) untuk melakukan sosialisasi maupun upaya lainnya di kelurahan ini.

Dari hasil wawancara lapangan dengan kordinator pemenangan TBNK di dua kelurahan ini diperoleh data bahwa itu semua sudah dilakukan dengan perhitungan politik yang matang. Tim Pemenangan di dua kelurahan ini diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di masyarakat. Mereka adalah pemuka masyarakat yang disegani dan juga Sebagian merupakan pemuka agama yang dihormati. Sehingga penutupan dua kelurahan ini tidak mendapat protes dari masyarakat setempat.

Sementara kubu Pasangan JadiJo juga tidak berani untuk melakukan penetrasi politik ke wilayah ini karena mengingat Tatong Bara didukung oleh kekuatan Partai Politik terkuat di Sulawesi Utara. Dari hasil wawancara terpisah dengan Tim Pemenangan kubu pasangan JadiJo, bahwa mereka tidak berani masuk ke dua wilayah ini. Karena khawatir tentang nasib saudara-saudara mereka yang ASN/PNS yang tinggal di dua kelurahan ini. Karena hal ini bisa berdampak pada karir mereka sebagai ASN/PNS (hasil wawancara dengan mantan anggota Tim Pemenangan Pasangan JadiJo pada bulan Mei 2022 di kota Kotamobagu).

KESIMPULAN

Pasangan Tatong Bara-Nayodo Kurniawan terbukti menggunakan strategi politik yang merupakan kombinasi dari strategi defensif dan ofensif. Strategi defensif dibuktikan dengan dilakukannya strategi mempertahankan dan menjaga konstituen agar tetap dalam militan memberikan dukungan dan tidak dapat dipengaruhi oleh kubu lawan politik. Strategi ofensif adalah dengan menekan lawan untuk tidak dapat masuk pada wilayah-wilayah basis pendukung mereka, serta meminimalisir jumlah pesaing politik dengan strategi “memborong” dukungan politik dari seluruh partai yang ada di kota Kotamobagu.

Keberhasilan pasangan Tatong Bara-Nayodo Kurniawan selain keberhasilan strategi yang dimainkan juga karena didukung oleh Tim Pemenangan yang profesional, berintegritas dan solid. Profesional oleh karena pengetahuannya yang baik tentang langkah-langkah metodologis untuk menyusun strategi politik, berintegritas karena konsisten secara penuh bekerja untuk pasangan ini. solid oleh karena tunduk pada 1 komando. Selain itu faktor sebagai petahana yang mempunyai kekuatan politik untuk memobilisasi birokrasi juga menjadi penentu kemenangan, disamping dukungan pihak “eksternal” yang memiliki power politik yang besar terhadap ASN/PNS yang berdomisili di kota Kotamobagu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Politik Lokal Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. Yogyakarta: LP2B.
- Adman Nursal. 2004. *Political Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anwar Arifin. 2003. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003
- Hadari, Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Inco, HaryPerdana. 2012. *Political Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu2014*. Studi Kasus Strategi
- Ispandiarno L. 2014. *Media dan Politik*, Jakarta: YayasanPustaka.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Schröder, Peter. 2004. *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung
- Surbakti Ramlan. 1992. *Memaham ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.

Sumber Lain:

- KPU kota Kotamobagu, 2019